



RILIS
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
20 S.D. 22 JUNI 2024

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja Spesifik pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2024. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI tersebut dipimpin oleh Bapak Aria Bima selaku Pimpinan/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan diikuti oleh 12 anggota Komisi VI DPR RI.

Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, hadir Ibu Zuryati Simbolon, Asdep Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN RI, Bapak Bob Indiarto Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bapak Filius Yulandri Plt Direktur Utama/Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Bapak Saifullah Lasindrang, Direktur Manajemen Resiko, Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Selain itu, dalam kunjungan Kerja Spesifik ini, juga hadir dari beberapa perwakilan dari Pabrik Pusri III, Pusri IV, Pusri IB, Pusri II B dan tentu saja hadir team perwakilan Pusri III B yang merupakan Pabrik baru yang akan didirikan efektif dilakukan pada 1 Desember 2023 dan direncanakan selesai pada Maret 2027.

Secara umum, kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk mendapatkan data, informasi terkait kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PUSRI) dalam rangka pemantauan pasokan dan distribusi pupuk di Provinsi Sumatera Selatan. Pusri menyampaikan Kapasitas produksi dalam satu Tahun terdiri dari Amonia sebesar 1.765.500 Ton, Urea 2.617.500 Ton dan NPK 300.000 Ton. Alokasi pupuk bersubsidi (PSO pada Tahun 2024 terdiri dari Urea sebesar 1.611.615 Ton untuk Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Di Jogjakarta, Jatim dan Bali serta NPK sebesar 350.869 Ton untuk Sumatera Selatan dan Lampung. Pupuk Non Subsidi dipasarkan di seluruh Indonesia sebagian diekspor ke negara Asia Tenggara. Di sisi lain Pusri juga menyampaikan adanya permasalahan Pendangkalan Sungai Musi menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya dalam operasional korporasi dan ketersediaan gas yang terbatas yang tidak sesuai dengan kontrak.

PT Pupuk Indonesia menyampaikan Kapasitas Produk Pupuk sebesar 14.612.500 Ton per Tahun, produk nonpupuk sebesar 8.661.500 Ton dari kelima Anak Perusahaan yaitu Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya Palembang, Pupuk Kujang Cikampek, Petrokimia Gersik dan Pupuk Kalimantan Timur. Pabrik 3B yang akan beroperasi pada Tahun 2027 diharapkan akan memberikan kontribusi penambahan kapasitas produksi sebesar 910.000 Ton per tahun. Di samping itu direncanakan Pembangunan pabrik di Papua dan peningkatan produk NPK dari PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia gersik, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Kujang Cikampek

Kesiapan Produk Pupuk Indonesia untuk pupuk subsidi pada Tahun 2024 sebesar 9.5 Juta Ton terdiri dari Urea sebesar 5,03 Juta Ton dan dan NPK sebesar 4,51 Juta Ton. Namun dalam kesempatan itu juga PT Pupuk Indonesia menyampaikan Piutang PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Pusri terhadap Pemerintah dari Kompensasi Pupuk subsidi (PSO) sampai dengan Mei 2024 terhitung dari Tahun 2020, 2022 dan 2023 sebesar Rp. 14,5 Triliun.

Komisi VI DPR RI mendesak segera ada penyelesaian pengerukan Sungai Musi yang selama puluhan tahun mengganggu sirkulasi bahan baku produksi maupun hasil produksi PT Pupuk Sriwijaya yang melibatkan lintas BUMN, Kementerian dan Daerah karena memberikan manfaat bagi banyak pihak termasuk Masyarakat di Sumatera Selatan. Selain itu penyediaan gas sebagai bahan pokok untuk produksi pupuk harus ada kepastian termasuk pembayaran piutang subsidi pupuk oleh pemerintah secara sistemik.

Jakarta, 22 Juni 2024
Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VI DPR RI
Ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan